

(Original Article)

Blue Economy Village: Model Kemitraan Berbasis ACTORS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Maritim Di Kabupaten Nagan Raya

Rahmi Indah Sari¹, Agatha Debby Reiza Macella^{1*}, Ilham Mirza Saputra¹, Ikhwan Rahmatika Latif¹

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Correspondence: agathadebby@utu.ac.id

Abstract

This Study aims to analyze the effectiveness of the ACTORS theory based partnership model in economic empowerment in maritime villages in Nagan Raya Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach through in depth interviews, observation, and documentation, and data validation using source triangulation and member check. The results showed that the confidence & competence and authority indicators obtained the lowest scores (2 out of 5 each), indicating low confidence, technical skills, and limited village authority in program implementation. In contrast, the responsibility indicator received the highest score (4 out of 5), which is due to the implementation of a digital financial governance system (siskeudes) that can improve accountability. These findings indicate the need to increase human resource capacity and strengthen local institutions to optimize the blue economy concept in a sustainable manner in coastal areas.

Keywords

blue economy, coastal community empowerment, local governance strategy

Received: 22 July 2025; Revised: 8 August 2025; Accepted: 27 August

Pendahuluan

Wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan strategis yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan *Blue economy* terutama di dalam sektor perikanan tangkap serta pengolahan hasil tangkapan laut. Namun, di sisi lain potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses teknologi dan pasar serta permasalahan lingkungan seperti abrasi, pencemaran, dan juga penurunan kualitas ekosistem sehingga menyebabkan kemiskinan struktural yang terus berulang di desa pesisir, Kristen & Wacana (2024). Kecamatan Kuala pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menjadi salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius terhadap masyarakat pesisirnya. Potensi hasil laut yang sangat melimpah belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan Kuala Pesisir adalah rendahnya inovasi dalam pengolahan dan pengelolaan hasil tangkap. Selain itu, keterbatasan pengetahuan, akses modal, dan teknologi membuat nilai tambah produk kelautan juga sulit untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat masih berfokus pada produk yang diolah secara sederhana saja seperti hasil tangkap yang melimpah hanya diolah menjadi ikan asin yang dikeringkan secara manual dengan bantuan sinar matahari.

Selain itu, kondisi musiman juga berpengaruh, dimana hasil tangkapan yang tidak terserap atau gagal diawetkan akibat cuaca yang tidak menentu seperti hujan, Hal ini tentu akan dapat menimbulkan kerugian.

Pada waktu tertentu nelayan bahkan tidak menghasilkan tangkapan sesuai dengan biaya operasional, nelayan akan sulit saat berada pada Musim paceklik (cuaca buruk, gelombang tinggi) sangat berpengaruh besar pada pendapatan dan ketahanan pangan keluarganya, Syafira et al., (2024). Kemiskinan yang merupakan Faktor yang membuat masyarakat pesisir mengalami keterbelakangan, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural Monintja & Yusfiandayani (2018). Masyarakat pesisir Aceh yang masih kental dengan adat dan budaya yaitu adanya peraturan-peraturan dari pemangku adat khusus pesisir seperti “Panglima Laot” yang mengatur tentang aturan adat yang mengatur kapan boleh dan tidaknya melaut, hal ini termasuk larangan melaut pada hari tertentu. Wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi potensi Blue Economy, seperti keterbatasan akses teknologi, pasar, dan partisipasi masyarakat Fadhillah & Tahir (2022). Selain permasalahan pengelolaan, masih banyak anak nelayan yang putus sekolah karna dituntut untuk membantu orangtuanya. Kebanyakan orangtua anak yang berada di wilayah pesisir tidak mementingkan pendidikan yang disebabkan oleh pola pikir yang masih awam. Selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi faktor kunci yang menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut belum mampu memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal maupun mengelola keuangan dengan baik.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan serta kapasitas sdm yang rendah menjadi permasalahan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu, Program Pemberdayaan masyarakat pesisir yang masih kurang optimal dari pemerintah kabupaten, serta masih bersifat top down dan kurang adaptif terhadap kondisi sosial budaya setempat, juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai aktor utama (Masud & Wahid, 2020). Kolaborasi dan sinergi antar instansi dinas pendukung juga masih lemah sehingga program hanya dijalankan masing-masing oleh beberapa dinas secara mandiri. Hal ini dibantah oleh Kirana & Artisa, (2020), yang menegaskan bahwa Pertumbuhan pembangunan seharusnya akan menjadi optimal apabila potensi suatu wilayah dapat dikelola secara efektif dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan peran masing-masing secara sinergi.

Sejalan dengan uraian permasalahan diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji bahwa Beberapa penelitian menunjukkan kesamaan topik dengan studi ini. Hendra et al., (2023) menyoroti strategi pemberdayaan sosial ekonomi di Kabupaten Bima melalui program PEMP yang bertujuan membentuk masyarakat perikanan yang terampil dan kolaboratif. Sejalan dengan itu, Puspitasari et al., (2023) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inovasi teknologi dalam mendukung perikanan berkelanjutan berbasis *blue economy*, Lalu Diederichsen et al., (2025) mengusulkan pendekatan *Multi-Use* untuk memperkuat *Blue Economy* lokal dengan mengintegrasikan nelayan dan pengetahuan tradisional. Sejalan dengan itu, Chen et al., (2020) menyatakan bahwa keterlibatan komunitas maritim krusial dalam program pemberdayaan karena dapat meningkatkan tanggung jawab individu dan mendukung keamanan maritim. Sementara itu, Matekenya & Ncwadi (2024) menyatakan bahwa meskipun ekonomi laut berpotensi mengurangi pengangguran di Afrika Selatan, keberhasilannya masih terbatas sehingga diperlukan strategi yang lebih menyeluruh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang membahas strategi pemberdayaan masyarakat pesisir, namun berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Hendra et al., (2023) menyoroti program pemberdayaan terpadu di Kabupaten Bima, termasuk Pokmaswas, PEMP, PUGAR, dan Ekonomi Kreatif. Puspitasari et al., (2023) menekankan pemanfaatan teknologi digital

untuk mendukung *blue economy*. Diederichsen et al., (2025) mengusulkan pendekatan Multi-Use untuk mengintegrasikan nelayan lokal dalam *Blue economy*. Chen et al., (2020) menekankan pentingnya peran komunitas maritim, sementara Matekenya & Nwadi (2024) menyoroti dampak lingkungan dan perlunya praktik berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas strategi pemberdayaan masyarakat pesisir, Namun lebih fokus kepada wilayah Indonesia bagian timur atau kawasan yang memiliki pembangunan infrastruktur yang sudah berkembang. Studi studi sebelumnya masih kurang menyoroti integrasi antara potensi dalam *Blue economy*, dinamika sosial budaya, serta peran para aktor lokal desa dalam lingkup wilayah barat Indonesia. Studi-studi tersebut sangat jarang menyoroti integrasi antara potensi *Blue Economy*, dinamika sosial-budaya, dan peran aktor lokal desa dalam konteks wilayah barat Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay sebagai kerangka analisis. Teori ini memuat enam indikator *Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities*, dan *Support* yang sangat cocok sebagai alat ukur efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir karena mampu menilai baik aspek struktural (kewenangan, dukungan, tanggung jawab) maupun aspek kultural serta kapasitas individu (kepercayaan diri, keterampilan, peluang). Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada dimensi ekonomi atau ekologi saja, tanpa analisis holistik terhadap peran para aktor lokal.

Gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian tentang pemberdayaan berbasis *Blue Economy* di wilayah pesisir barat Indonesia yang memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal. Selain itu, penggunaan teori ACTORS secara kontekstual untuk mengkaji sinergi antar pelaku lokal dan juga tantangan struktural dalam penerapan strategi *Blue Economy* juga masih sangat terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan model pemberdayaan yang berbasis teori ACTORS, yang mengintegrasikan peran para pemerintah desa, masyarakat setempat, serta lembaga atau instansi yang mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis efektivitas model kemitraan berbasis ACTORS dalam pemberdayaan *Blue Economy* di Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, mengidentifikasi indikator terlemah dalam pelaksanaan teori ACTORS, serta untuk merumuskan implikasi strategis untuk dapat memperkuat ekonomi desa maritim yang berkelanjutan.

Kajian Pustaka

Blue Economy

Pendekatan *blue economy* telah berkembang sebagai konsep penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan inklusif. *Blue Economy* Menurut Alifa & Zahidi, (2024) dalam penelitiannya didefinisikan sebagai penggabungan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menekankan pada pemanfaatan laut secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem laut. Dari definisi *blue economy* yang disampaikan oleh Alifa & Zahidi maka dapat disimpulkan bahwa Pelestarian Ekosistem laut tidak hanya melihat keuntungan di bidang ekonomi saja, akan tetapi juga tidak merusak lingkungan dan tentu harus adil kepada semua masyarakat lokal. Keunggulan *Blue Economy* adalah mendorong inovasi lokal dan nilai tambah produk, bukan hanya eksploitasi sumber daya yang masih kategori mentah saja. Hal ini sejalan dengan Pernyataan dari Al Fahri et al., (2022) *Blue economy* yang merupakan suatu gaya ekonomi yang berbasis kelautan yang berkaitan seimbang dengan melestarikan lingkungan pesisir, adapun upaya untuk mendukung implementasi ekonomi biru, diperlukan strategi pemberdayaan yang efektif. Dalam konteks pembangunan pesisir, *blue economy* mencakup beberapa sektor seperti yang dinyatakan oleh Febriana & Paksi,(2023) seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan bioindustri

laut. Sistem ekonomi yang berdasarkan terhadap perlindungan lingkungan dan sumber daya alam yaitu sistem *Blue Economy*, Donesia et al., (2023). Namun, ada perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh Masud & Wahid,(2020) yaitu Penerapan Blue Economy di tingkat desa sangat sering mengalami hambatan seperti Kapasitas Sdm yang masih sangat rendah, keterbatasan akses pasar, serta sifat ketergantungan kepada Program dari pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa, *Blue Economy* akan berhasil bukan hanya ditentukan oleh potensi alam dan masyarakat saja, tetapi juga oleh strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dan adaptif terhadap konteks lokal.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dengan cara mengembangkan potensi serta keterampilan yang telah dimiliki, melalui pemanfaatan sumber daya pesisir yang tersedia di lingkungan sekitar. Menurut Wahyuningsih et al., (2024), tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya lokal. Didalam hal ini juga terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti sejauh mana inovasi yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, kesesuaiannya dengan nilai-nilai budaya lokal, serta perencanaan teknis dan ketersediaan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Winata (2023). Upaya ini mencakup peningkatan keterampilan, akses permodalan, teknologi, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Bender (2016). Akan tetapi, berbeda dengan pernyataan dari bender, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adebayo & Butcher(2023) Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan yang seringkali dianggap pasif dikarenakan pihak luar dapat mengontrol segala proses, sehingga pemberdayaan menjadi tokenisme, seharusnya pemberdayaan yang lebih dalam dapat memungkinkan masyarakat dapat berperan dan terlibat aktif, yang terakhir memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif sendiri. Berbeda dengan pernyataan dari Adebayo & Butcher , (Hendra et al., (2023) menekankan pentingnya intervensi program terpadu dan pelibatan kelembagaan berbasis komunitas, sedangkan penelitian dari Puspitasari et al., (2023) lebih menekankan berbagai pendekatan pemberdayaan, seperti integrasi teknologi digital. Selain itu lain hal nya dengan puspitasari, pendapat menurut Diederichsen et al., (2025) lebih menekankan kepada kolaborasi lintas sektor (Multi-use approach) untuk memaksimalkan potensi wilayah pesisir.

Namun sebagian besar studi tersebut lebih memfokuskan penelitiannya pada wilayah Indonesia bagian timur atau daerah dengan pengembangan infrastruktur pesisir yang sudah maju atau pada aspek ekonomi dan ekologi. Hal ini membuat konteks penelitian yang berbeda antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya karena penelitian ini lebih fokus pada wilayah pesisir barat Indonesia, yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik, seperti peran adat panglima laut, keterbatasan pasar, serta tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, kondisi ini sangat memerlukan model pemberdayaan yang tidak hanya berbasis pada sektor ekonomi saja, namun tetap melihat sektor sosial, kultural dan juga tata kelola lokal.

Teori ACTORS

Dalam penelitian ini, teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay menjadi kerangka utama dalam menganalisis peran aktor-aktor lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Teori ini mencakup enam indikator utama: *Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities*, dan *Support* Sahrul & Budhi (2023). Indikator dalam teori ini meliputi: 1) Authority, memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengambil keputusan 2) Confidence and Competence,

Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri dari masyarakat. 3) Trust, Membangun kepercayaan melalui transparansi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. 4) Opportunities, Memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. 5) Responsibilities, Setiap perubahan yang dilakukan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar membawa kemajuan dan perbaikan yang berkelanjutan. 6) Support, Mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh, pendekatan aktor menjadi penting untuk melihat sejauh mana sinergi dan partisipasi dari berbagai pihak dapat membentuk model ekonomi desa maritim yang berkelanjutan Mustanir et al., (2023).

Kerangka ini menilai pemberdayaan secara holistik, mencakup dimensi struktural (kewenangan, dukungan, tanggung jawab) dan dimensi kultural-individual (kepercayaan diri, keterampilan, peluang). Teori ini relevan untuk konteks desa pesisir dikarenakan, Multi-dimensi tidak hanya melihat dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial, kelembagaan, dan psikologis. Kontekstual, dapat mengungkap hambatan yang bersumber dari regulasi, struktur pemerintahan desa, hingga faktor budaya lokal. Selain itu, Aplikatif, indikatornya dapat langsung diukur melalui wawancara dan observasi di lapangan, memudahkan analisis implementasi program pemberdayaan.

Namun, Dibalik semua keunggulannya ACTORS juga memiliki keterbatasan. Teori ini tidak secara tegas dan jelas dalam memasukkan faktor eksternal seperti dinamika pasar global, perubahan iklim, atau migrasi tenaga kerja, yang juga dapat memengaruhi keberhasilan pemberdayaan pesisir. Oleh karena itu, penggunaannya dalam penelitian ini dikolaborasi dengan analisis perilaku lokal, termasuk adat istiadat dan keadaan sosial masyarakat.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya dan Kebaruan Penelitian Dibandingkan dengan penelitian Hendra et al., (2023) yang menitikberatkan pada program PEMP dan Pokmaswas di Bima, penelitian ini menambahkan dimensi evaluasi berbasis ACTORS untuk mengukur kapasitas masyarakat secara komprehensif. Berbeda pula dari Puspitasari et al., (2023) yang fokus pada digitalisasi perikanan, studi ini melihat hambatan kultural dan kewenangan desa yang membatasi adaptasi teknologi. Sementara itu, Diederichsen et al., (2025) menyoroti kolaborasi multi-sektor, penelitian ini menguji sejauh mana kolaborasi tersebut terhambat oleh keterbatasan kepercayaan diri dan kompetensi masyarakat. Di sisi lain, menunjukkan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam setiap inisiatif pembangunan maritim. Sementara itu, Matekenya et al. (2024) menyatakan bahwa meskipun ekonomi laut berpotensi mengurangi pengangguran di Afrika Selatan, keberhasilannya masih terbatas sehingga diperlukan strategi yang lebih menyeluruh.

Namun, studi-studi tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada wilayah Indonesia bagian timur atau kawasan dengan infrastruktur pesisir yang relatif berkembang. Kedua, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menganalisis peran aktor lokal desa dalam konteks pemberdayaan Blue economy berbasis potensi lokal. Ketiga, banyak penelitian belum mengaitkan pendekatan Blue Economy dengan tantangan kultural, seperti adat istiadat masyarakat pesisir, misalnya peran "Panglima Laot" dalam mengatur aktivitas melaut. Mildaeni & Muharudin (2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dengan mengangkat konteks spesifik masyarakat pesisir di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pendekatan ACTORS digunakan untuk menilai efektivitas strategi pemberdayaan dari sisi wewenang, kompetensi, kepercayaan, peluang, tanggung jawab, dan dukungan lintas sektor. Dengan

demikian, studi ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dijalankan secara efektif melalui pendekatan ekonomi biru di wilayah dengan karakteristik budaya dan sosial yang khas.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti dan apa adanya berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Peneliti berusaha menyajikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam studi ini dipilih berdasarkan kapasitas mereka dalam menguasai serta memahami informasi, data, atau fakta yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, Rusfiana (2022). Pendekatan kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk teks, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan arsip resmi, bukan angka. Penelitian ini berfokus pada penggambaran dan interpretasi fenomena yang diteliti serta berupaya memahami realitas secara apa adanya berdasarkan fakta Ahsanulhaq (2019). Fokus utama penelitian adalah mengkaji pemanfaatan potensi ekonomi biru (blue economy) dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In –depth interview) dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Adapun Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Umkm Dispringdagkop Nagan Raya, Analis Kebijakan DPMGP4 Nagan Raya, Geuchik Desa Kuala Baro, Geuchik Desa Padang Rubek, Geuchik Desa Pulo, Sekretaris Desa Kuala Baro, Sekretaris Desa Padang Rubek, Sekretaris Desa Pulo, Beserta Perwakilan Masyarakat Desa Kuala Baro berjumlah 10 orang, Masyarakat Desa Padang Rubek 10 orang, dan juga masyarakat Desa Pulo 10 orang. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan pemberdayaan, data statistik dari BPS, serta literatur ilmiah/jurnal yang relevan. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung/tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara penelitian yang sudah terstruktur yang telah disusun berdasarkan indikator teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay. Pengambilan sampel/informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah suatu teknik yang menentukan untuk melakukan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan hal hal tertentu, Maharani & Bernard (2018).

Instrumen wawancara berisi semua daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat melaksanakan wawancara dengan informan yang mencakup peran dan kewenangan aktor lokal dalam program pemberdayaan, Tingkat kepercayaan diri serta kompetensi dari masyarakat, Pelaksanaan Program secara transparansi serta kepercayaan dalam program, peluang pengembangan *Blue Economy*, serta tanggung jawab dan juga dukungan dari semua pihak yang terkait. Wawancara dengan para informan masing masing berdurasi 40 – 90 menit, yang dilakukan di kantor desa atau dinas juga rumah masyarakat, dan direkam dengan izin dari yang bersangkutan untuk memudahkan transkripsi nantinya. Pelaksanaan observasi selama pelaksanaan kunjungan lapangan yang mengamati interaksi antar masyarakat, proses kerja, dan juga kondisi lapangan yang sebenarnya. Dokumentasi termasuk foto kegiatan pelaksanaan penelitian, serta data statistik dari BPS dan juga dokumen resmi.

Keabsahan data penelitian ini dijamin dengan melakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari semua informan yang sudah diwawancarai dan Triangulasi Metode melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sahrul & Budhi (2023), di mana observasi berfungsi untuk mengamati kondisi sosial secara

langsung, ekonomi, serta lingkungan masyarakat, sekaligus berinteraksi dengan warga guna mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang tersedia. Selain itu juga telah dilakukan member check, yaitu hasil wawancara dan temuan awal dikonfirmasi kembali kepada para informan untuk memastikan bahwa informasi yang sudah didapat sudah akurat.

Peneliti juga sudah mendapatkan izin yang resmi dari pihak yang ingin diwawancarai yaitu pihak instansi, beserta desa yang ingin ditinjau lebih lanjut sebelum pengumpulan data. Masing masing informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, metode, serta hak para informan, yang termasuk hak untuk menolak menjawab atau menghentikan partisipasinya kapan saja. Adapun kerahasiaan identitas informan sangat dijaga oleh peneliti dengan menggunakan inisial tertentu dalam melakukan publikasi. Data yang diperoleh juga hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Setelah seluruh data dikumpulkan dari lapangan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi Hendra et al., (2023).

Hasil

Merujuk kepada fokus penelitian, pada bagian ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Model kemitraan berbasis ACTORS dalam pemberdayaan *Blue Economy* di Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya dengan menggunakan indikator kriteria Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang di paparkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay menjadi kerangka utama dalam menganalisis peran aktor-aktor lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Teori ini mencakup enam indikator utama: Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, dan Support (Sahrul & Budhi, 2023) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kewenangan

Desa yang berada di kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya seperti Desa Kuala Baro, Desa Padang Rubek ,dan juga Desa Pulo. Dalam hal ini semua desa memiliki kewenangan, namun kewenangan yang diberikan bersifat terbatas dalam hal menentukan kebijakan pemberdayaan *Blue economy*. Desa hanya bisa melakukan musyawarah musrembang dengan masyarakat namun keputusan akhir berada pada tingkat pemerintah kabupaten, sementara desa hanya berperan dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, keterbatasan kewenangan substantive tersebut dapat menghambat implementasi program pemberdayaan secara optimal.

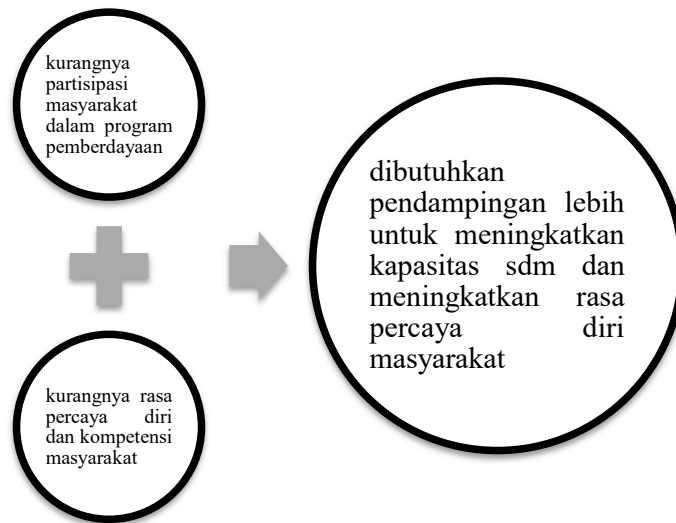
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian menjelaskan bahwa kewenangan memang diberikan oleh kabupaten kepada desa melalui peraturan bupati, namun harus disesuaikan dengan prioritas anggaran yang dibuat dan tidak bisa disesuaikan dengan kemauan desa jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Kewenangan dalam mengatur pemberdayaan masyarakat desa seharusnya milik desa sendiri.

Kepercayaan diri & Kompetensi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pulo, salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Masyarakat menunjukkan semangat tinggi untuk terlibat dalam program namun ada juga beberapa masyarakat yang enggan mengikuti program ekonomi berbasis kelautan, namun mereka masih kurang percaya diri karena keterbatasan kompetensi teknis dan *manajerial*. Masyarakat sangat senang dan

bersemangat dengan program yang dibuat dan juga banyak dari masyarakat yang mau untuk berpartisipasi ,Namun harus ada pendukung yang nantinya membantu kami dalam menjalankan program karna program ini baru dimulai masi membutuhkan bimbingan lebih lanjut ,Jika ada yang mendukung dan membimbing lebih lanjut masyarakat akan menjalankan program tersebut dengan semangat,apalagi Dilihat dari latar belakang Desa Pulo yang merupakan desa terpencil”(Eka Fitriani, 7 april 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlunya pendampingan dan dukungan lebih lanjut terhadap pelaksanaan program yang dilakukan,karena terlihat dari kurangnya pemahaman dan pengalaman serta pengetahuan dari masyarakat sehingga masyarakat masih belum mampu menjalankan program secara mandiri sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas secara sistematis melalui pelatihan ,pendampingan,dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan usaha berbasis potensi laut dengan percaya diri dan memiliki keahlian yang memadai.



Gambar 1.
Bagan Confidence and competence (Rasa percaya diri dan kompetensi)
masyarakat Desa Pulo

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa Masyarakat masih kurang berpartisipasi di dalam program pemberdayaan serta kurangnya rasa percaya diri dan kurangnya potensi yang dimiliki sehingga masyarakat sangat membutuhkan pendampingan lebih untuk dapat meningkatkan kapasitas sdm dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat.

Kepercayaan

Hasil penelitian pada beberapa desa di kuala pesisir,salah satunya yaitu Desa Padang rubek dalam hal ini berdasarkan pemaparan dari salah satu pemerintah desa Akeun Abnur, menekankan bahwa, Pemerintah desa selalu mengutamakan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah dan melakukan kegiatan sesuai dengan hasil musrembang serta pemerintah desa juga senantiasa terbuka dalam hal informasi. Seperti program yang sedang dilaksanakan yaitu program untuk mengurangi stunting sebagai program unggulan posyandu ,dalam hal ini pemerintah desa selalu transparansi mengenai anggaran untuk program tersebut dan selalu memastikan makanan bergizi itu tersalurkan untuk anak anak yang mengikuti program posyandu.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan, maka dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa dapat mengelola penggunaan dana desa terutama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan program posyandu di desa tersebut Pemerintah Desa senantiasa memperhatikan makanan yang tersalurkan sesuai dengan yang dianggarkan dan tentunya makanan bergizi dengan kualitas terbaik dalam hal ini pemerintah desa sangat memikirkan kepercayaan masyarakat dengan selalu transparansi terhadap program yang dilakukan,serta selalu melibatkan masyarakat dalam semua hal yang berhubungan dengan program yang akan di bentuk atau sudah dijalankan.

Peluang

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Daerah ini termasuk dalam kawasan pesisir yang kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di sektor perikanan tangkap yang menjadi salah satu aktivitas utama masyarakat setempat Fadhillah & Tahir (2022), Hal tersebut dibuktikan dengan data yang ada didalam Grafik berikut:



Gambar 2.

Grafik Produksi Perikanan Tangkap Laut Nagan Raya

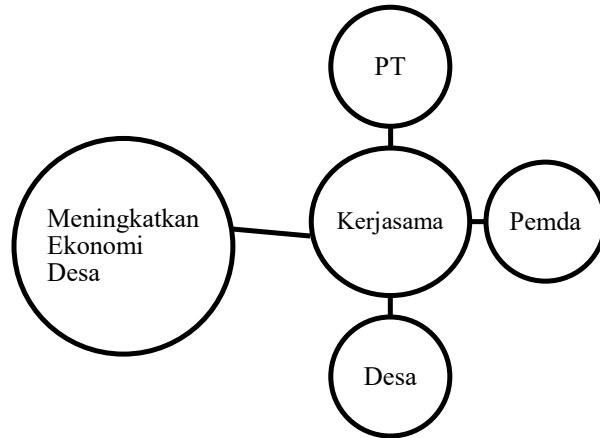
Sumber : Data Badan Pusat Statistik provinsi Aceh 2022-2024

Berdasarkan Grafik tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa potensi perikanan tangkap di Kabupaten Nagan Raya selama Tahun 2022-2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi, 2020-2024), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Dapat dilihat bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi jasa lingkungan yang melimpah pada tahun 2022 sampai tahun 2024, namun dalam hal pemanfaatannya hingga kini masih belum berjalan secara maksimal Arianto (2020).

Menurut pernyataan dari Ridiani Fitri dalam wawancara, menegaskan bahwa Peluang kerjasama memang selalu ada dan selalu terbuka, karena pemerintah harus bersinergi antara pemerintah desa dan kabupaten harus berkolaborasi untuk membentuk masyarakat khusus pelaku usaha yang utama pelaku usaha yang masuk dalam sektor kita dan intinya harus ada komunikasi antara pemeritah kabupaten, daerah, dan desa.”(Ridiani Fitri, 23 april 2025)

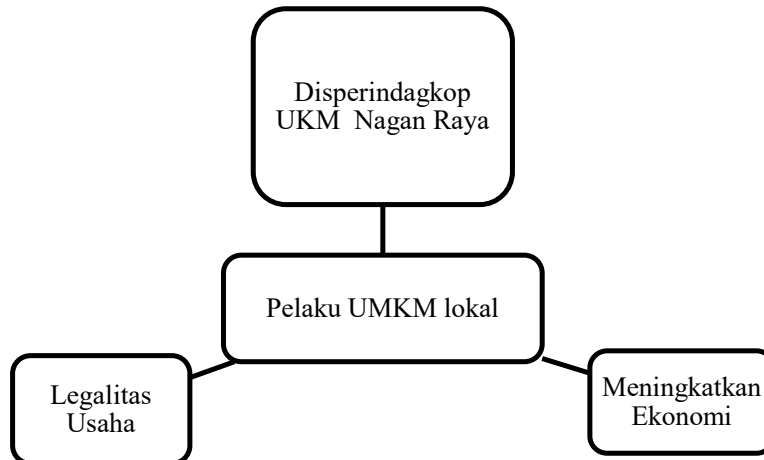
Berdasarkan hasil penelitian, dapat menyimpulkan bahwa peluang kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten bahkan perguruan tinggi selalu ada dan selalu terbuka, namun memang belum dimanfaatkan sepenuhnya, serta kurangnya komunikasi antar sektor yang menyebabkan terjadinya keterbatasan informasi, dan juga kurangnya pengetahuan teknologi serta pengetahuan sehingga masi belum bisa memasarkan produk dengan optimal. Oleh karena itu, Aktor pendukung sangat diperlukan seperti Dispringdagkop UKM Nagan raya, serta perguruan tinggi dan mitra

lainnya hadir sebagai penghubung antara masyarakat dan peluang tersebut , jika peluang tidak ditransformasikan menjadi aktivitas produktif, maka potensi besar akan tetap menjadi potensi yang belum bernilai ekonomi nyata.



Gambar 3.
**Kolaborasi peluang kerjasama Antara Pemerintah Daerah,
 Pemerintah Desa serta Perguruan Tinggi**
 Sumber :Diolah Oleh Penulis

Gambar 3 diatas menjelaskan bahwa kolaborasi / kerjasama dan sinergi antar instansi sangat dibutuhkan, karena hal tersebut sebagai penghubung antara masyarakat dan peluang tersebut, hal itu nantinya akan meningkatkan ekonomi desa pesisir berkelanjutan.



Gambar 4.
**Disperindagkop UKM membantu umkm dalam pengurusan NIB,
 Sertifikat halal, dan P-IRT**
 Sumber : Dispringdagkop UMKM Nagan Raya,2024

Gambar 4, diatas menunjukkan bahwa dalam hal indikator *Opportunities* (Peluang) memperlihatkan peluang kerjasama yang sangat besar dengan dinas yang ada untuk mempermudah akses kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM lokal yang ada. Dalam hal ini Dinas Dispringdagkop UMKM Nagan Raya membantu Pelaku Umkm Lokal untuk pengurusan Nib, Sertifikat Halal, dan P-irt untuk legalitas usaha ,dengan adanya legalitas usaha tersebut, hal ini akan memperkuat

keyakinan konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan membuat penjualan meningkat yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi para pelaku umkm di daerah tersebut.

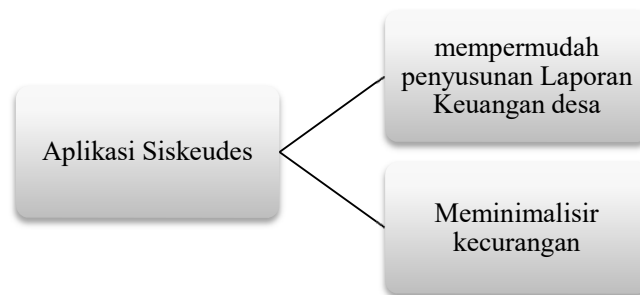
Tanggungjawab

Setiap instansi yang memiliki program pasti harus selalu memiliki tanggungjawab yang baik agar program nya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan awal. Dalam hal ini tentu dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana desa demi mencapai program yang berkualitas dan sesuai dan tepat sasaran.

SISKEUDES, atau Sistem Keuangan Desa, adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu aparat desa dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Penggunaan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, meminimalkan risiko penyimpangan, serta mempermudah integrasi data. Dengan demikian, transparansi meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pun semakin kuat, Nadaa & Priyanti (2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan melihat hal yang terjadi dilapangan bahwa Sejak 2018, DPMGP4 Nagan Raya memakai aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah sebuah perangkat aplikasi yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara tertib dan terstruktur, penyusunan anggaran, Rpjm, Rkpg, Apbg sampai laporan pertanggungjawaban menggunakan aplikasi Siskeudes tersebut.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pertanggungjawaban, bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang sesuai dengan peraturan yang ada, serta dalam hal ini selain mempermudah desa, aplikasi ini juga tersistem jadi bisa meminimalisir kecurangan dalam politik aparatur. Dpmgp4 nagan raya juga selalu melakukan evaluasi bulanan ke desa ,dengan begitu program bisa berjalan lancar dan anggaran terstruktur dan tentunya pembagian tanggungjawab yang jelas antara desa, instansi pemerintah ,akan menciptakan struktur kerja yang sinergis dan meminimalisir *inefisiensi* program.



Gambar 5.
Bagan Fungsi Siskeudes DPMGP4 Nagan Raya
Sumber : DPMGP4 Nagan Raya

Dukungan

Berdasarkan Hasil penelitian Pada salah satu objek penelitian di Disperindagkop & UKM Nagan Raya. Bentuk dukungan yang diberikan dari Disperindagkop & Ukm nagan Raya yaitu seperti melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk yang memiliki usaha,

atau yang sudah punya mindset untuk membangun usaha nantinya akan dilakukan pendampingan, selain itu juga didampingi untuk pembuatan legalitas usaha, sertifikat usaha, sertifikat halal, NIB, izin edar, serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan peralatan untuk mendukung bisnis, akan tetapi hal tersebut diwajibkan sesuai dengan permintaan masyarakat dan tentu tidak sembarangan dalam memberikannya.

Pihak Dispringdagkop juga membuat pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun semua yang diberikan tidak terlepas dari tanggungjawab dari masyarakat tersebut, masyarakat yang sudah menerima bantuan nantinya akan dievaluasi oleh Disperindagkop & UKM Nagan Raya terkait barang yang diberikan dipakai atau tidak, jika tidak digunakan nantinya akan ditarik kembali. Disperindagkop & UKM Nagan Raya juga membantu masyarakat untuk menjembatani mereka agar bisa berkembang dengan mempertemukan mereka dengan rumah kemas upkd provinsi agar masyarakat nantinya dapat mengetahui design kemasan yang bagus dan sesuai target pasar.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dukungan dari instansi pemerintah itu tentu ada. Pemerintah daerah seperti halnya Disperindagkop & UKM Nagan Raya selalu mendukung apapun keperluan masyarakat selama hal itu masih dalam sektor mereka. Namun ada beberapa faktor yang membuat dukungan itu terhambat, yaitu faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta cara masyarakat menggunakan dukungan tersebut dengan sebaik mungkin agar bisa membawa masyarakat pesisir untuk lebih berkembang. Seharusnya jika melihat dari segi potensi hasil tangkap serta potensi lain di kuala pesisir, dan ada kemauan dari masyarakat untuk mengembangkan potensinya sangat melimpah, namun potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan, hal itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan. Faktor lainnya diakibatkan oleh masyarakat yang memiliki pemikiran yang masih awam dan merasa tidak peduli dengan hal tersebut. Seharusnya hal itu merupakan suatu kepentingan yang sangat dibutuhkan demi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tabel 1.
Support Dukungan Disperindagkop & UKM Nagan Raya

Support (Dukungan) Disperindagkop & UKM Nagan Raya	
1	Pendampingan kepada masyarakat yang memiliki Usaha Umkm
2	Pendampingan pembuatan Legalitas Usaha, Sertifikat usaha, Sertifikat Halal, NIB, izin edar produk kecamatan kuala pesisir kabupaten Nagan Raya
3	Menghibah alat produksi untuk masyarakat yang membutuhkan alat produksi untuk usaha di Desa Pulo dan Penjual ikan asin Di area Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
4	Melakukan penyerahan sertifikat Halal/P-IRT Kepada Pelaku Umkm ikan asin di kecamatan kuala Pesisir Nagan Raya

Sumber : Disperindagkop & UKM Nagan Raya

Tabel 1 menunjukkan bahwa Disperindagkop & UKM telah memberikan dukungan dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki usaha Umkm, juga melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha juga menghibah alat produksi untuk membantu para umkm dalam memproduksi produknya serta menyerahkan Sertifikat Halal dan P-irt kepada pelaku Usaha UMKM Ikan Asin di Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya. Hal ini sebagai bentuk indikator dukungan (*support*) Dispringdagkop umkm Nagan Raya kepada masyarakat yang berada di area kuala Pesisir yang mempunyai usaha UMKM lokal hasil tangkap laut di area tersebut.

Dalam hal ini, teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang tepat dan relevan untuk memahami dinamika yang terjadi untuk mengkaji sejauh mana elemen elemen kunci teori

tersebut telah berjalan secara efektif dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat desa maritim di Kecamatan Kuala Pesisir sebagai berikut:

Tabel 2.
Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Indikator ACTORS

No	Indikator	Kondisi di lapangan	Faktor penghambat	Faktor pendukung
1	<i>Authority</i> (Kewenangan)	Desa hanya sebatas merencanakan program melalui musyawarah ,tetapi keputusan akhir berada di pemerintah kabupaten(kewenangan bersifat administratif)	Keterbatasan kewenangan substantive, ketergantungan tinggi pada keputusan kabupaten.	Adanya forum musyawarah desa dan BUMG sebagai saluran perencanaan
2	<i>Confidence & Competence</i> (kepercayaan diri & kompetensi)	Masyarakat sudah banyak yang ingin berpartisipasi didalam program pemberdayaan,namun belum percaya diri dalam mengakses pasar secara lebih luas	Rendahnya keterampilan terhadap pengolahan dan pengelolaan hasil tangkapan laut, serta keterbatasan teknologi	Adanya pelatihan yang dibuat oleh dinas terkait
3	<i>Trust</i> (Kepercayaan)	Hubungan antara aparaturnya dan masyarakat sudah cukup baik,namun masih ada sedikit keraguan terkait transparansi dalam pemberian bantuan	Distribusi bantuan tidak merata	Adanya kegiatan musyawarah desa (musrembang), juga adanya partisipasi dari tokoh masyarakat yang hadir sebagai mediator
4	<i>Opportunity</i> (Peluang)	Memiliki potensi besar dari hasil tangkapan laut(ikan,udang,dll) namun belum dikelola secara optimal	Keterbatasan akses modal serta pasar	Wilayah pesisir yang terletak secara strategis,serta dibantu dengan adanya program <i>Blue Economy</i> dari pemerintah
5	<i>Responsibility</i> (Tanggungjawab)	Pertanggungjawaban anggaran desa semakin transparan dan mudah berkat aplikasi siskeudes,sehingga akuntabilitas meningkat	Masih perlu peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan aplikasi digital	Digitalisasi tata kelola desa (Siskeudes), regulasi akuntabilitas keuangan desa
6	<i>Support</i> (Dukungan)	Dukungan dari para instansi pemerintah kabupaten terkait sudah berjalan ,namun masyarakat kurang memanfaatkan dukungan tersebut	Rendahnya partisipasi masyarakat, minim inisiatif untuk mengakses bantuan	Dukungan terbuka dari pemerintah kabupaten, adanya program fasilitasi dan pelatihan

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel Ringkasan hasil penelitian berdasarkan indicator ACTORS diatas, maka dapat disimpulkan terkait skor per indikator sebagai berikut:

Tabel 3.
Skor Indikator berdasarkan teori ACTORS

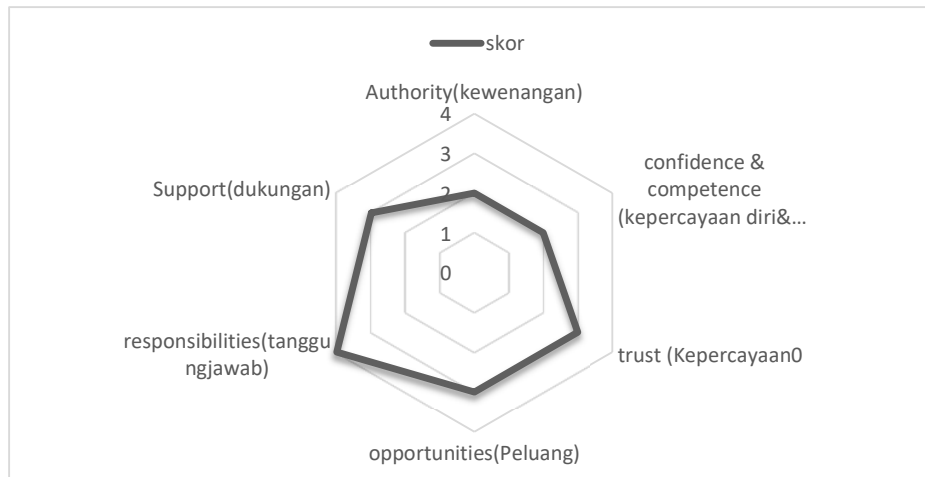
Indikator	Skor (1-5)	Keterangan
<i>Authority</i> (Kewenangan)	2	Desa hanya merencanakan program pemberdayaan lewat musyawarah, namun keputusan akhir yang akan di implementasikan kedalam program tetap keputusan dari pemerintah kabupaten.
<i>Confidence & Competence</i> (Kepercayaan Diri & Kompetensi)	2	Mempunyai SDM, namun keterampilan teknis dalam perencanaan serta pengelolaan program masih rendah
<i>Trust</i> (Kepercayaan)	3	Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat pada pemerintah desa, hanya saja masih ada sedikit masalah di bagian distribusi bantuan yang terkadang kurang merata
<i>Opportunity</i> (Peluang)	3	Memiliki potensi hasil laut yang sangat banyak, namun belum dikelola secara maksimal, selain itu juga permasalahan kekurangan modal serta akses pasar yang masih belum memadai
<i>Responsibility</i> (Tanggungjawab)	4	Pertanggungjawaban anggaran semakin transparan dan mudah dengan aplikasi siskeudes
<i>Support</i> (Dukungan)	3	Dukungan dari kabupaten ke desa sangat terbuka, namun masyarakat kurang berpartisipasi dan tidak memanfaatkan dukungan yang ada

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dengan melihat Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Indikator ACTORS dan Tabel 2. Skor indikator berdasarkan teori ACTORS maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir di kuala pesisir sudah berjalan, Namun belum bisa dikategorikan maksimal dikarenakan masih diperlukan peningkatan koordinasi serta kolaborasi antar instansi, Penguatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan teknis/pedoman untuk pemerintah desa dalam menjalankan program agar Blue Economy nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Diskusi

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan *Blue economy* di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sangat dipengaruhi oleh variasi kekuatan antarindikator pemberdayaan masyarakat Dalam penelitian ini, teori ACTORS yang dikembangkan oleh Cook dan Macaulay menjadi kerangka utama dalam menganalisis peran aktor-aktor lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Teori ini mencakup enam indikator utama: Kewenangan, Kepercayaan diri dan kompetensi, Kepercayaan, Peluang, Tanggungjawab, dan Dukungan (Sahrul & Budhi, 2023).



Gambar 6.
Radar Chart (Spider web): Kekuatan dan Kelemahan ACTORS

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 6 Radar Chart (Spider web): Kekuatan dan kelemahan ACTORS diatas menunjukkan bahwa skor implementasi dari keenam indikator ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay menunjukkan bahwa indikator Authority dan Confidence & Competence memperoleh skor terendah , yaitu skor 2, sedangkan untuk indikator trust, Opportunities dan support memiliki skor 3. dan skor tertinggi ada pada indikator responsibilities yaitu 4.

Kewenangan

Kewenangan, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat apabila bisa dikelola dengan baik, juga dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan, N. A. Putri et al., (2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa kewenangan memang diberikan oleh kabupaten kepada desa melalui peraturan bupati, namun harus disesuaikan dengan prioritas anggaran yang dibuat dan tidak bisa disesuaikan dengan kemauan desa jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Hal itu bertentangan, dengan pendapat dari Widjaja, yang menyatakan bahwa otonomi desa adalah hak, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan warganya sendiri.

Indikator Authority (kewenangan) yang menjadi salah satu indikator dengan skor rendah yakni 2. Dalam hal ini menunjukkan bahwa peran desa masih terbatas pada ranah perencanaan administratif, tanpa kewenangan substantif untuk dapat merealisasikan program strategis *Blue economy* secara mandiri. Ketergantungan keputusan pada pemerintah kabupaten membuat desa menjadi pelaksana pasif.

Namun dalam hal ini desa hanya bisa membuat musyawarah dengan masyarakat terkait program yang akan berlangsung dan hasil akhir berada di tangan pemerintah Kabupaten Hal ini tentu mengakibatkan ketergantungan terhadap program dari atas (*Top Down*) dan lemahnya inisiatif lokal juga menyebabkan rendahnya kemandirian desa dalam mengelola potensi *blue economy* secara optimal. Temuan ini serupa dengan penelitian dari Chen et al., (2020) yang menyatakan bahwa komunitas pesisir Asia, dimana kewenangan parsial menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini

didukung dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara otonom dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, membina kehidupan sosial kemasyarakatan, serta mendorong partisipasi warga melalui inisiatif lokal. Selain itu, desa juga memiliki pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul dan tradisi adat dalam tatanan negara Bender (2016). Sejalan dengan hal itu Menurut, Lindawaty (2012). Desa idealnya harus memiliki ruang yang cukup untuk merencanakan, mengawasi, dan menerapkan pembangunan yang didasarkan pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam kewenangan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Sementara itu Menurut Nadaa & Priyanti (2023) menyatakan bahwa kemandirian desa tidak bisa dicapai kecuali desa diberikan otoritas yang nyata dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya desanya.

Authority (Kewenangan) didalam hal ini, Desa seharusnya memiliki ruang partisipasi dalam merancang program melalui musyawarah desa, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kebijakan pemerintah kabupaten yang diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Hal tersebut seperti yang tertuang dalam : Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 membahas mekanisme teknis mengenai pembagian dan penetapan detail alokasi Dana Desa untuk setiap gampong di wilayah administratif yang bersangkutan, Peraturan ini mengatur langkah langkah pembagian serta penetapan rincian dana desa untuk *gampong* dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020. Perbup ini menetapkan prosedur dan mekanisme dalam pengalokasian dana desa, yang harus diikuti oleh setiap gampong dalam merencanakan dan melaksanakan program-program desa.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mengenai mekanisme pengalokasian serta penetapan rincian Dana Alokasi Gampong bagi seluruh gampong yang ada di wilayah kabupaten, Peraturan ini memberikan peraturan pelaksanaan terkait pelaksanaan musyawarah desa, termasuk standar umum, Target, manfaat, basis, ruang lingkup, jenis, pelaku musyawarah, ruang lingkup pengaturan mencakup tugas serta tanggung jawab Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mekanisme pelaksanaan musyawarah desa, tata tertib yang mengatur jalannya musyawarah, tindak lanjut atas hasil keputusan, hingga aspek pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur tentang prosedur pengalokasian dan penetapan rincian Dana Alokasi Dana untuk setiap Gampong, Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan dan penetapan rincian tentang dana alokasi untuk *gampong* didalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023. Perbup ini menetapkan Tata cara dan langkah langkah dalam penggunaan dana desa, agar menjadi acuan untuk pemerintah desa dalam hal merencanakan dan melaksanakan program-program desa. Meskipun desa memiliki ruang partisipasi, pelaksanaannya tetap mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Keterbatasan ini menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap pendekatan *top-down* dan rendahnya inisiatif lokal dalam mengembangkan potensi ekonomi biru (Sabrijar, wawancara 2025). Hal ini sesuai dengan temuan Masud dan Wahid (2020) yang menyatakan bahwa otonomi desa yang masih kurang dalam pengelolaan program berdampak pada rendahnya kualitas pemberdayaan masyarakat, Masud & Wahid (2020).

Dengan demikian, temuan ini memperkuat teori ACTORS bahwa authority tanpa kapasitas substantif akan melemahkan efektivitas pemberdayaan.

Rasa percaya diri & kompetensi

Menurut Haniva & Dewanti, (2024), Confidence and competence yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan menguji kapasitas serta rasa percaya diri dari masyarakat ,sehingga mereka dapat mengetahui serta memahami potensi diri. Putri Susanto & Sri Maruti, (2023) Menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan suatu program pemberdayaan sangat

dibutuhkan, Rasa percaya diri yang ada pada seseorang disebabkan adanya beberapa aspek dalam kehidupannya, seperti Seseorang yang mengenali potensi dalam dirinya cenderung memiliki rasa percaya diri dan keyakinan untuk bertindak, sebab hal tersebut didasari oleh pengalaman pribadi, kemampuan nyata, prestasi yang telah dicapai, serta keyakinan bahwa tujuan dapat diraih melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri. *Self – Efficacy* atau keyakinan tentang kemampuan dalam diri sendiri sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ide dan inovasi serta berkelanjutan program pemberdayaan Bandura (2020). Hal ini tentunya didukung dengan adanya Pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, serta kesadaran. Upaya ini juga dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran Bender (2016). Sementara itu Kementerian Desa dalam Laporan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kepercayaan diri masyarakat terhadap kemampuan dirinya untuk melaksanakan usaha ekonomi desa, termasuk Bumdes dan UMKM Lokal (Kemendes PDTT RI., 2022).

Merujuk pada penjelasan diatas ,hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator ini mendapatkan skor rendah dalam penelitian ini dikarenakan rendahnya kompetensi masyarakat yang disebabkan oleh faktor pendidikan formal yang rendah, minimnya akses pelatihan serta budaya yang membuat masyarakat kehilangan rasa percaya diri. Hal ini menjadikan masyarakat kesulitan mengadopsi inovasi serta teknologi baru. Masyarakat di Desa Pulo, mengaku masih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan program usaha berbasis hasil laut (Eka Fitriani, wawancara 2025). Ideal nya indikator *confidence* dan *competence* sesuai dengan situasi yang terjadi di Desa Pulo seperti dalam hal *Confidence/* kepercayaan diri itu tumbuh dari pengalaman yang nyata. seperti, pernah berhasil menjual produk olahan laut sendiri, walau hasil yang didapatkan kecil. Dari hal tersebut masyarakat akan yakin dengan diri sendiri. selain itu untuk melatih kompetensi masyarakat diperlukan Pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan praktik langsung bukan sekadar seminar. Ditambah sistem mentoring yang berkelanjutan agar kompetensi itu tidak cepat hilang atau tetap di ingat oleh masyarakat itu sendiri. Situasi ini sejalan dengan Hendra et al. (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan *intensif* sangat penting untuk memaksimalkan kapasitas sosial ekonomi komunitas pesisir Hendra et al., (2023). Implikasinya, ACTORS menegaskan bahwa pentingnya penguatan indikator Confidence & Competence melalui pendidikan vokasional, literasi teknologi, dan pelatihan yang berkelanjutan, bukan hanya intervensi yang hanya bersifat jangka pendek.

Kepercayaan

Menjaga kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diwujudkan, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa. Mengingat dana desa ditujukan untuk kepentingan masyarakat, maka setiap kegiatan yang didanai dari sumber tersebut wajib diketahui oleh warga, karena mereka memiliki hak untuk mengakses informasi terkait penggunaannya Hamzah & Asy'ari (2023). Pemerintah desa sangat Berperan penting ,selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Kewenangan diberikan kepada mereka untuk mengelola dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat secara mandiri, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai asal-usul serta adat istiadat yang mendapat pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Andni et al., (2023).

Hasil penelitian di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Dengan Melihat Hasil wawancara dengan informan dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program pemberdayaan di Kuala Pesisir hampir mendekati optimal dalam melaksanakan program dengan kriteria Trust (Kepercayaan) hal ini terlihat dari pemerintah desa dapat mengelola penggunaan dana desa terutama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan program posyandu di desa tersebut Pemerintah Desa senantiasa memperhatikan makanan yang tersalurkan sesuai dengan yang dianggarkan dan tentunya makanan bergizi dengan kualitas terbaik dalam hal ini pemerintah desa sangat memikirkan kepercayaan masyarakat dengan selalu transparansi terhadap program yang dilakukan,serta selalu melibatkan masyarakat dalam semua hal yang berhubungan dengan program yang akan di bentuk atau sudah dijalankan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengatur mengenai pengertian desa, di mana prinsip transparansi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini secara khusus ditekankan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f dan p, yang menuntut adanya pemerintahan desa yang terbuka serta mendorong penyampaian informasi kepada masyarakat desa, selain itu didalam pasal 62 juga mengamanatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa,termasuk melalui pengumuman laporan keuangan menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah desa, seperti di Desa Padang Rubek, telah menjalankan pengelolaan dana desa secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk dalam program-program pemberdayaan seperti posyandu (Akeun Abnur, wawancara 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu didalam Pasal 24 huruf d menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan dengan asas keterbukaan. Sejalan dengan hal itu Pasal 68 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui informasi dari pemerintah desa terkait perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, Pasal 82 menjelaskan bahwa Masyarakat juga memiliki hak untuk mempunyai sistem akses terkait informasi publik desa. Hamzah dan Asy'ari (2023) yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam membangun kepercayaan masyarakat. Adapun dalam hal mewujudkan akuntabilitas juga sudah diatur didalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (4) huruf f, mengatur bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota, serta memberikan laporan keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun didalam Pasal 27 huruf b dan c menjelaskan bahwa Pemberhentian Kepala Desa dapat dilakukan apabila tidak melangsungkan kewajiban atau melakukan penyelewengan wewenang. Dengan melihat temuan ini dapat disimpulkan bahwa secara tegas menyatakan teori ACTORS ,indikator Trust merupakan elemen krusial yang dimana tanpa ada dukungan dari masyarakat ,maka kekuasaan resmi tidak bisa berjalan dengan baik.

Peluang

Wirausaha adalah proses menghasilkan dan menentukan serta mempunyai ambisi dalam kehidupan suatu individu. Ambisi sering kali diwujudkan dalam bentuk peluang dan ide-ide kreatif yang menjadi modal penting dalam menjalankan usaha kewirausahaan dengan lebih baik, Usman & Hapsari (2022). Peluang yang ada diantaranya mengolah hasil laut menjadi kerupuk ikan, dan makanan lainnya yang bernilai jual tinggi serta memanfaatkan kerajinan tangan dari eceng gondok, serta pariwisata bahari. Namun, kesempatan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan dalam hal informasi, teknologi, serta akses pasar. Menurut Fathoni menjelaskan bahwa UMKM hasil tangkap laut harus mampu melakukan inovasi produk dan disertifikasi hasil laut agar tidak hanya mengandalkan penjualan ikan segar tetapi juga berinovasi membuat abon ikan, kerupuk ikan, hingga produk siap saji beku (*frozen food*) yang akan memperluas pasar serta

memperpanjang umur penyimpanan produk Putri et al., (2024). Sejalan dengan hal itu Menurut Puspitasari et al., 2024, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan peluang penting dimulai saat *pandemic COVID-19*, UMKM mulai memanfaatkan sosial media, *marketplace* dan *e-commerce* untuk menjual produk mereka, Puspitasari et al., (2023) .

Menurut pernyataan dari Ridiani Fitri, Peluang kerjasama memang selalu ada dan selalu terbuka ,Karna kita harus bersinergi antara pemerintah desa dan kabupaten harus berkolaborasi untuk membentuk masyarakat khusus pelaku usaha yang utama pelaku usaha yang masuk dalam sector kita dan intinya harus ada komunikasi antara pemerintah kabupaten, daerah, dan desa. ”(Ridiani Fitri, 23 april 2025).

Dengan melihat hal itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Hasil penelitian mengenai peluang dalam program pemberdayaan ini masih cukup optimal terlihat dari Kemauan dalam hal kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten bahkan perguruan tinggi selalu ada dan selalu terbuka ,namun memang belum dimanfaatkan sepenuhnya, juga kurangnya akses pasar dan modal yang terbatas membuat peluang Blue Economy belum sepenuhnya berkembang. Disinilah pentingnya actor pendukung seperti Dispringdagkop UKM Nagan raya, serta perguruan tinggi dan mitra lainnya hadir sebagai penghubung antara masyarakat dan peluang tersebut ,jika peluang tidak ditransformasikan menjadi aktivitas produktif, maka potensi besar akan tetap menjadi potensi yang belum bernilai ekonomi nyata. Appiah et al., (2023) menegaskan bahwa investasi *blue economy* hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan yang bersifat inklusif serta dapat membuka akses pasar. Oleh karena itu, temuan ini menantang teori Actors yang melihat Opportunity sebagai faktor yang bersifat netral yaitu tanpa dukungan structural, seharusnya opportunity tidak secara langsung menciptakan kesejahteraan.

Tanggung Jawab

Menurut Bunga, (2020) Aspek penting dalam pelaksanaan program pemerintah yaitu Akuntabilitas kinerja. Dalam hal tersebut Instansi pemerintah wajib membuat laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai upaya bentuk pertanggung jawaban dari pencapaian tujuan strategis, Bunga (2020) dan kedisiplinan dalam penganggaran Wibowo (2020).

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program di kecamatan kuala pesisir, Kabupaten nagan raya dapat dikatakan optimal dengan melihat indikator tanggungjawab yang penuh telah dilaksanakan Sebagai upaya untuk mempermudah proses pelaksanaan program tersebut. DPMGP4 di setiap kabupaten yang ada di Indonesia termasuk di Kecamatan kuala pesisir, kabupaten Nagan Raya diberikan tanggungjawab untuk mengelola sebuah aplikasi yang mampu memudahkan pengelolaan keuangan desa yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes oleh aparatur desa untuk perencanaan dan pelaporan anggaran. Penggunaan aplikasi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Teungku Arbiansyah, wawancara 2025). dari Nadaa dan Priyanti (2023) juga menyatakan bahwa cara strategis agar meminimalisir kesalahan dan menaikkan tingkatan akuntabilitas dalam pemberdayaan desa adalah dengan melakukan digitalisasi pengelolaan desa, Nadaa & Priyanti (2023). Temuan ini berbanding terbalik dengan penelitian (Chen et al., 2020) menyoroti lemahnya pertanggungjawaban di beberapa desa pesisir yang ada di Asia. Dengan demikian ,penelitian ini telah menantang asumsi sebelumnya dan memperkuat teori ACTORS bahwa responsibility dapat berjalan baik bila ditopang oleh inovasi serta teknologi dan regulasi yang jelas.

Dukungan

Bahwa Peran serta kewenangan pemerintah tetap menjadi elemen penting dalam mendorong aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat. Bahkan di negara-negara maju, baik pemerintah pusat maupun daerah masih aktif berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun sepatutnya mengambil langkah serupa, apalagi pemerintah memiliki otoritas untuk menyediakan layanan dasar serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal hingga ke tingkat desa Lindawaty (2012). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah diatur melalui pembagian kewenangan pemerintahan yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni urusan yang menjadi kewenangan mutlak, urusan bersama (konkuren), urusan pemerintahan umum, serta mengatur tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan indikator Dukungan yang terjadi dilapangan, menegaskan bahwa dukungan dari instansi seperti Disperindagkop UKM dan DPMGP4 sudah tersedia dalam bentuk pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, dan pemberian alat produksi. Bahkan kolaborasi dengan perguruan tinggi juga telah dilakukan, seperti pelatihan oleh Tim PPK Ormawa di Desa Pulo. Namun, rendahnya partisipasi dan motivasi masyarakat menyebabkan banyak bantuan yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Ridiani Fitri, wawancara 2025). Ini senada dengan temuan Chen et al. (2020), yang menjelaskan bahwa keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor utama untuk menentukan keberhasilan program *Blue economy*, Chen et al., (2020).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun dukungan struktural dan teknis telah diberikan, pemberdayaan masyarakat pesisir belum berjalan efektif karena masih rendahnya inisiatif lokal, kapasitas masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Strategi pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-budaya, serta peningkatan kapasitas lokal secara berkelanjutan, menjadi kunci dalam mewujudkan desa maritim yang mandiri dan berdaya saing.

Sejalan dengan Penelitian ini, Jasiyah dkk.,(2024) Mendukung hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa teori ACTORS membantu menganalisis kolaborasi antaraktor juga melihat dampak dari pentingnya perubahan structural,koordinasi,serta peningkatan kapasitas lokal agar pemberdayaan bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat setempat Jasiyah & Suriadi (2024).

Namun hal ini dibantah oleh Muchlis(2017)Menegaskan bahwa Interaksi yang terjadi antar Aktor lokal juga terkadang seringkali berdampak buruk terhadap program dikarenakan adanya kontestasi,ego sectoral,hingga dominasi elite sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat, Muchlis (2023).akan tetapi hal tersebut kemudian dibantah kembali oleh Alfiandri et al., (2024)mempertegas bahwa partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi multi pihak serta strategi inovatif dan monitoring sangat dibutuhkan sebagai jaminan keberhasilan program serta keberlanjutan program nantinya.

Selaras dengan pendapat Alfiandri et al.,2024,penelitian dari Sayidah et al., (2022) mendukung bahwa strategi pemberdayaan harus dimulai dari pengetahuan terhadap potensi yang ada,mengetahui karakteristik serta kebutuhan lokal di sekitar sehingga sangat mengedepankan pelibatan serta pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan. Temuan ini sejalan dengan Appiah et al., (2023)yang menekankan bahwa efektivitas intervensi pemerintah pemerintah di komunitas pesisir bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat yang memadai ,dukungan hanya menjadi formalitas administrative dan tidak menghasilkan perubahan substansial.Dengan demikian,penelitian ini dapat memperluas

pemahaman teori ACTORS bahwa dukungan eksternal memerlukan respons internal dari masyarakat agar program benar benar berdampak pada kemandirian *Blue Economy*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai Penerapan Strategi Blue economy dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kecamatan Kuala Pesisir menunjukkan bahwa hasilnya beragam jika dilihat melalui kerangka ACTORS. Indikator Kewenangan dan Kepercayaan diri & kompetensi masih lemah dikarenakan kewenangan desa yang hanya bersifat administratif, selain itu juga kapasitas dari masyarakat masih sangat rendah. Sementara itu, pada indikator Kepercayaan dan juga Peluang ada di peringkat cukup. Dan indikator Tanggungjawab menjadi indikator yang memperoleh peringkat tertinggi berkat penggunaan aplikasi siskeudes yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada desa yang berada di kecamatan kuala pesisir, kabupaten nagan raya. Selain itu, indikator support ditegaskan bahwa Dukungan dari pemerintah sudah sangat terbuka namun kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga dukungan dari pemerintah hanya sia sia saja dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Secara teoritis, temuan ini dapat memperkuat relevansi teori ACTORS dalam menilai dinamika pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan inovasi terbaru. Dengan adanya teknologi digital yang mendukung seperti aplikasi siskeudes hal ini mampu menjadikan kekuatan bagi indikator responsibility, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti lemahnya aspek pertanggungjawaban di desa pesisir. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini yaitu strategi *blue economy* tidak hanya membutuhkan potensi hasil tangkap laut, namun juga diperlukan sinergi kelembagaan serta kolaborasi antar instansi pemerintah, juga dibutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, serta pemahaman untuk masyarakat agar masyarakat sadar akan pemanfaatan dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang terletak pada jumlah informan yang masih terbatas serta fokus wilayah yang hanya mencakup beberapa desa di kecamatan kuala pesisir, sehingga hasil penelitian ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui studi komperatif di desa pesisir lainnya. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, yang melibatkan lebih banyak actor, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tiap indikator ACTORS terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir secara lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Nagan Raya beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pemerintahan (DPMGP4) Nagan Raya atas partisipasi dan kerja sama yang telah diterima selama penelitian berlangsung. Penghargaan Khusus juga disampaikan kepada Para Geuchik Desa Pulo, Padang Rubek, dan Kuala Baro yang telah memberikan izin, dan bantuan informasi yang sangat berarti untuk kelancaran Penelitian ini. Tak lupa, terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Universitas Teuku Umar atas kesempatan dan bimbingannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibu Agatha Debby Reiza Macella, S.AP., M.Si., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, perhatian, serta bimbingan yang sangat berarti hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga sinergi dan kerjasama ini dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini. Seluruh proses penelitian, analisis, serta penyusunan artikel dilakukan secara mandiri dan independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil atau kesimpulan yang diperoleh.

ORCID ID

Rahmi Indah Sari <https://orcid.org/0009-0000-1323-7937>

Agatha Debby <https://orcid.org/0000-0001-8837-3685>

Ilham Mirza Saputra <https://orcid.org/0000-0003-0390-6847>

Ikhwan Rahmatika Latif <https://orcid.org/0000-0003-3359-2180>

Referensi

- Adebayo, A. D., & Butcher, J. (2023). Community Empowerment in Nigeria's Tourism Industry: An Analysis of Stakeholders' Perceptions. *Tourism Planning and Development*, 20(4), 583–603. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2127865>
- Ahsanul Khaq, M. (2019). Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 2(1). <https://doi.org/10.24176/jpp.v2i1.4312>
- Al Fahri, A. A., Norrahmawati, D., Bailovan, K. D., Alfarez, R. U., Rahmawati, S. A., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2022). Reformasi Implementasi Konsep Blue Economy sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 168–174. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525>
- Alfiandri, A., Rivai, N. I., Darmawan, E., & Irawan, B. (2024). Community Governance for Coastal Empowerment in Bintan Regency: Challenges and Strategies. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(3), 989–1000. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i3.57681>
- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48–65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2024.v38.1.4>
- Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., Sholikhah, F. I., Ulfa, M., & Aini, I. N. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>
- Appiah, M. K., Ameko, E., Asiamah, T. A., & Duker, R. Q. (2023). Blue economy investment and sustainability of Ghana's territorial waters: an application of structural equation modelling. *International Journal of Sustainable Engineering*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/19397038.2023.2195422>
- Arianto, M. F. (2020). *Jurnal Geografi: Geografi dan Pengajarannya. Jurnal Geografi: Geografi Dan Pengajarannya*, 3(1), 1–7.
- Bandura, A. (2020). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society*, 12(3), 313. https://doi.org/10.12681/psy_hps.23964
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>

- Chen, S., De Bruyne, C., & Bollempalli, M. (2020). Blue economy: Community case studies addressing the poverty-environment nexus in ocean and coastal management. *Sustainability (Switzerland)*, 12(11). <https://doi.org/10.3390/su12114654>
- Diederichsen, S. D., Weiss, C. V. C., Lima, F. A. V., dos Santos, B. A. Q., Guyot-Téphany, J., Thomas, J. B. E., Lukic, I., Rebours, C., Walsh, J. P., McCann, J., Juell-Skielse, E., Gröndahl, F., & Scherer, M. E. G. (2025). Exploring the contribution of multi-use approach in fostering local blue economy: Insights from the Global South. *Ocean and Coastal Management*, 266(July 2024). <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107689>
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Widodo. (2023). Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959.
- Fadhillah, N., & Tahir, M. A. (2022). Fuel Recommendation Information System (Bbm) Case Study: Ministry of Marine, Fisheries and Food of Nagan Raya Regency. *Asian Journal of Aquatic Sciences*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.31258/ajoa.5.1.20-25>
- Febriana, E. E., & Paksi, A. K. (2023). Strategi World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Mendukung Program Blue Economy di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 102–113. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1792>
- Hamzah, A. K., & Asy'ari, M. A. (2023). Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 131–138. <https://doi.org/10.46821/equity.v2i2.232>
- Haniva, S. Al, & Dewanti, A. P. (2024). Menuju Masyarakat Berdaya: Membedah Pendekatan Self-Help Dan Technocratic Pada Desa Sidosermo Dan Desa Batu Malang. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 20–26. <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.858>
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880>
- Jasiyah, R., & Suriadi. (2024). The Disabled Community Empowerment Model with Social Entrepreneurship Approach to Tenoon Business. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 6(1), 92–98. <https://doi.org/10.60083/jidt.v6i2.534>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kristen, U., & Wacana, W. (2024). EMPOWERMENT OF THE KONDA MALOBA VILLAGE COMMUNITY TOWARDS AN INDEPENDENT ENTREPRENEURIAL VILLAGE. 4(2), 59–65.
- Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 3(2), 243–271. <http://ruslidjamik.wordpress.com>
- Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 1(5), 819. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826>
- Masud, M. I., & Wahid, A. (2020). Model pengembangan pengelolaan hasil tangkap ikan masyarakat pesisir kabupaten Pasuruan melalui pendekatan linear programming dan business model canvas dalam industri 4.0. *Agromix*, 11(1), 115–124.

- <https://doi.org/10.35891/agx.v11i1.1672>
- Matekenya, W., & Ncwadi, R. (2024). The macroeconomic impact of ocean economy financing in South Africa. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 6503, 1–18. <https://doi.org/10.1080/18366503.2024.2342607>
- Mildaeni, I. N., & Muharudin, E. (2022). Social Values and Society (SVS). 4(2). <https://doi.org/10.26480/svs.02.2022.2>
- Monintja, D., & Yusfiandayani, R. (2018). Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, November, 59–65.
- Muchlis, F. (2023). Actor Contestion and Collaborative Empowerment Model of Orang Rimba in Bukit Duabelas National Park Jambi Province. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 240–250. <https://doi.org/10.22500/10202241017>
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (n.d.). Pemberdayaan masyarakat.
- Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES. *Matra Pembaruan*, 7(1), 61–73. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73>
- Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Untuk Perikanan Berkelanjutan Berbasis Konsep Blue Economy. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 215–225. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i2.3836>
- Putri, N. A., Hariyoko, Y., & Murti, I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Terpadu Badan UsahaMilik Desa Bersama Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS)Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan SumberrejoKabupaten Bojonegoro. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 409–420.
- Putri, R. D., Kurli, A., & Wibisono, A. (2024). Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pelatihan pengolahan ikan rucah 1. 8(6), 6–11.
- Putri Susanto, A., & Sri Maruti, E. (2023). Peningkatan Kepercayaan Diri Masyarakat Gampong Jawa di Banda Aceh Melalui Kegiatan Kontribusi Sosial. *Media Abdimas*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v2i1.2668>
- Rusfiana, Y. (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Langsat: Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 9(1), 1–9.
- Sahrul, & Budhi, S. (2023). Mengubah Sampah Menjadi Rezeki: Analisis Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 175–183. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i2.69>
- Sayidah, N., Wardhono, H., & Marwiyah, S. (2022). Analysis of Community Empowerment Strategies for Coastal Community Power in Indonesia Marine School Program. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(1), 290–302. <https://doi.org/10.14738/assrj.91.11556>
- Syafira, M., Taqwanur, Nisa', L. K., Ravitasari, S., Fidhdho, E. Al, Solichah, N. L., Mulya, A. F., Firmandah, I. C., & Fernanda, S. A. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Produk Olahan Sambal Kerang di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati. *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i1.1147>
- Usman, U., & Hapsari, V. R. (2022). Peluang Mengembangkan Kewirausahaan Dengan Menggali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 1–8. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1888>
- Wahyuningsih, S., Haviana, E., Pratiwi, I. W., Utomo, B., & Ramdhani, R. (2024).

- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kegiatan Kesadaran Melek Berwirausaha. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 4579–4586.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/28940>
- Wibowo, Y. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Uniska Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>
- Winata, I. N. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 91. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053>